

MODEL KONSEPTUAL HUBUNGAN MODAL SOSIAL DAN KINERJA BUMDES

Andreas Suranto¹, Florentinus Nugro Hardianto²

^{1,2}Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma
e-mail: ¹andres.ranto@gmail.com; ²fnugroho@gmail.com

ABSTRAK

BUMDes merupakan lembaga/organisasi yang dapat mewujudkan pembangunan desa menjadi mandiri, berkelanjutan dan berciri lokal pedesaan. Melalui BUMDes perubahan bidang ekonomi dan sosial di desa dapat membaik. Perkembangan BUMDes tentunya dipengaruhi oleh modal sosial yang ada di desa. Modal sosial biasanya berdampak positif dalam pembangunan masyarakat. Maka dari itu, modal sosial mempunyai pengaruh yang penting dalam meningkatkan kinerja BUMDes. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes. Dalam analisisnya digunakan metode review literatur untuk mengetahui hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes. Hasil analisis menggambarkan adanya hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes. Hal ini dapat dilihat dalam komponen-komponen modal sosial yang mendorong pada kualitas dan kuantitas lembaga/organisasi BUMDes yang berdampak pada pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes yang baik inilah kinerja BUMDes ditentukan. Kinerja BUMDes merupakan kunci dalam membangun desa menjadi lebih baik lewat modal sosial di desa. Melalui hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes, desa dapat mengembangkan potensi desa dengan menyesuaikan kondisi lingkungan, budaya dan sosial-ekonomi desa.

Kata Kunci: modal sosial, BUMDes, kinerja BUMDes

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan organisasi/lembaga publik yang melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintahan desa. BUMDes dibentuk atas persetujuan bersama masyarakat desa dan pemerintah desa secara formal dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. BUMDes dibentuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran di desa. BUMDes dapat berperan dalam pengembangan kelembagaan dan pengelolaan usaha masyarakat dan akhirnya dapat membawa perubahan pada bidang ekonomi dan sosial di desa.

BUMDes dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendesa No. 4 tahun 2015 tentang Perusahaan Milik Desa. Dengan demikian BUMDes memiliki landasan hukum yang kuat dan diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan desa yang telah disepakati oleh masyarakat desa.

BUMDes sebagai lembaga/organisasi merupakan elemen penting dalam pembangunan pedesaan [1]. BUMDes dapat menjadi penggerak masyarakat dalam mewujudkan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan berciri lokal pedesaan. BUMDes merupakan wujud dari kemandirian di desa. BUMDes dapat mengembangkan potensi ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan [2]. Pengembangan potensi ini dapat melalui sisi produksi, pemasaran, distribusi dan pengelolaan sumber daya manusia di desa [3]. Pengembangan potensi

ekonomi ini tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa, sehingga membawa pada pengentasan kemiskinan di desa.

Prakarsa dan partisipasi masyarakat membantu perbaikan manajemen organisasi/lembaga BUMDes. Apabila prakarsa dan partisipasi masyarakat desa terus dikembangkan dalam pengelolaan BUMDes, maka BUMDes akan bisa beroperasi dengan baik. BUMDes dengan kinerja baik dapat membantu kemandirian masyarakat desa dan berkontribusi terhadap kesejahteraan warga desa. Selain itu BUMDes melalui prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dapat melakukan penguatan ekonomi di desa. BUMDes dapat memberikan manfaat dalam penciptaan usaha baru dan lapangan pekerjaan baru.

BUMDes mempunyai kendala-kendala. Banyak masyarakat di desa tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya BUMDes bagi kesejahteraan desa. Masyarakat desa masih beranggapan bahwa keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung [4]. Kendala lainnya adalah bahwa BUMDes belum menjadi alat/instrumen untuk membangun perekonomian desa yang demokratis, inklusif dan berkelanjutan [5]. Sumber daya manusia lokal yang masih memiliki kapasitas dan kapabilitas terbatas juga menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDes itu sendiri [4]. BUMDes belum mampu untuk menjalin hubungan dengan pihak lainnya. Relasi BUMDes dengan Pemerintah Desa belum terjalin secara penuh sebagai bagian dari pemberdayaan desa [6].

Perkembangan BUMDes di desa dipengaruhi oleh modal sosial dalam bentuk tradisi-tradisi desa yang berkembang dalam masyarakat pedesaan [7]. Modal sosial dibangun dalam tradisi-tradisi desa dalam interaksinya dengan masyarakat di desa. Tradisi-tradisi desa juga berpengaruh pada pengentasan kemiskinan di

desa. Oleh karena itu, modal sosial mempunyai pengaruh kuat dalam menggerakkan penduduk desa dalam kegiatan BUMDes di desa.

Analisis dalam makalah ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian terdahulu tentang hubungan modal sosial terhadap BUMDes. Siska Katiya Santi (2018) dengan penelitian berjudul: “Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten” menunjukkan bahwa modal sosial dapat berperan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pengembangan teknologi informasi desa, mengembangkan potensi desa dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Dewi Kirowati dan Lutfiyah Dwi (2018) dengan penelitian berjudul: “Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)” menunjukkan bahwa modal sosial dapat memperkuat kerjasama dan norma dalam pengelolaan BUMDes. Robiatul Adawiyah (2018) dengan penelitian berjudul: “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejatera Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)” menunjukkan bahwa modal sosial mendukung pengembangan organisasi sehingga semakin berkembang dan mampu menyesuaikan kondisi jaman. Pengaruh modal sosial terhadap sejumlah BUMDes dapat merubah hal dalam segi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan organisasi dengan tujuan kesejahteraan masyarakat di desa. Pengelolaan BUMDes yang berdasar pada modal sosial dapat membawa perubahan ke arah yang positif. Modal sosial mempengaruhi keberlangsungan hidup BUMDes di desa.

TINJUAN PUSTAKA

Modal Sosial

Modal sosial sendiri merupakan kesatuan utuh yang hidup, tumbuh dan melekat dalam komunitas, organisasi/ lembaga dan masyarakat yang cenderung berdampak positif bagi pembangunan masyarakat. Modal sosial adalah kombinasi norma-norma yang berada dalam sistem sosial dengan memadukan interaksi dan berkontribusi pada pembangunan manusia di suatu masyarakat [8], bertujuan pada kerjasama antar anggota masyarakat [9] dan penggerak dalam pencapaian tujuan bersama [10]. Modal sosial merupakan kekuatan penggerak dalam pemberdayaan dan pengelolaan komunitas, organisasi/ lembaga dan masyarakat [11]. Modal sosial melekat pada hubungan dalam komunitas, organisasi/ lembaga dan masyarakat untuk tujuan bersama. Modal sosial tidak terbatas pada aktor atau kelompok mayoritas tetapi juga pada aktor atau kelompok minoritas melalui hubungan dan kebersamaan yang terjalin sebagai

pembangun kehidupan sosial [12]. Modal sosial sebagai perekat sosial dalam menjaga keutuhan kelompok secara bersama-sama [3]. Modal sosial merupakan perekat kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya [13].

Modal sosial menjadi kekuatan dalam menjaga keharmonisan komunitas, organisasi/ lembaga dan

masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Modal sosial merupakan salah satu bentuk hubungan yang ideal dalam aktifitas ekonomi [14]. Modal sosial terjadi melalui hubungan yang harmonis yang digunakan dalam komunitas, organisasi/ lembaga dan masyarakat [12]. Hubungan yang ideal ini mengalahkan individualitas [15]. Keharmonisan ini berdampak pada aspek ekonomi dan sosial dalam komunitas, organisasi/ lembaga dan masyarakat [16]. Modal sosial mampu membantu dalam mengatasi permasalahan warga [15]. Oleh karena itu modal sosial memegang peranan penting dalam memfungsikan dan memperkuat komunitas, organisasi/ lembaga dan masyarakat [17].

Modal sosial membentuk kegiatan ekonomi yang menguntungkan. Modal sosial dianggap sebagai sumber daya yang melibatkan jaringan dan hubungan yang diatur dalam norma-norma bersama serta dilandaskan pada sikap saling percaya dan berkerjasama dalam mencapai keuntungan bersama melalui kelangsungan produktivitas masyarakat [18][19][20]. Produktivitas inilah yang membentuk kegiatan ekonomi [21]. Modal sosial merupakan suatu keunggulan dalam memperoleh keuntungan ekonomi [22]. Modal sosial didorong untuk pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan ekonomi [23]. Bentuk kerjasama dengan berbagai pihak memungkinkan modal sosial untuk dapat membentuk kegiatan ekonomi [6]. Kegiatan ekonomi terjadi atas dasar saling percaya oleh berbagai pihak [23].

Komponen Modal Sosial

Modal sosial juga diimplementasikan dalam wujud harmonisasi terhadap komponen-komponen modal

sosial dalam masyarakat. Modal sosial diklasifikasikan dalam enam komponen yaitu jaringan/hubungan dalam kelompok masyarakat, solidaritas dan kepercayaan dalam masyarakat, kerjasama timbal balik, komunikasi dan informasi, kohesi anggota masyarakat, dan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat [8]. Penelitian lainnya menyebutkan bahwa modal sosial juga mengacu pada nilai-nilai dan tindakan proaktif [10], kesetaraan, tanggung jawab dan daya tanggap, dan komitmen antara anggota masyarakat yang dapat mempengaruhi pengembangan kegiatan ekonomi [24]. Dalam pertumbuhan ekonomi komponen modal sosial juga dihubungkan pada kepercayaan, kekompakan, altruism, gotong royong, jejaring dan kolaborasi sosial [25]. Komponen modal sosial mendorong partisipasi dalam masyarakat [26]. Partisipasi dalam masyarakat ini menghasilkan organisasi/ lembaga publik yang efektif dan layanan yang lebih baik [27]. Jadi komponen modal sosial

tersebut secara tidak langsung membentuk kualitas dan kuantitas organisasi/lembaga publik dalam masyarakat [28].

Modal sosial mempunyai komponen utama dalam mengkoordinasikan kerjasama yang saling menguntungkan yaitu jaringan, norma dan kepercayaan sosial [29]:

- a. Jaringan sosial. Jaringan sosial terjadi karena adanya kesamaan misi dalam pencapaian kesejahteraan bersama dalam hubungan masyarakat. Jaringan sosial digunakan sebagai sumber daya yang penting dimiliki oleh seseorang untuk berinteraksi dengan sesamanya [30]. Jaringan sosial memfasilitasi harapan dan kepercayaan di antara para pelaku dalam suatu jaringan, sehingga pencapaian tujuan tertentu dapat terlaksana [18]. Jaringan sosial menumbuhkan nilai dan kepercayaan yang menjadi dasar dalam pencapaian kesejahteraan bersama. Jaringan sosial membangun relasi positif dari adanya kepercayaan dan nilai-nilai yang dibangun dalam masyarakat [3]. Relasi positif ini berdampak pada jaringan yang bertahan lama karena hubungan timbal balik para pelaku dalam jaringan. Adanya jaringan sosial dapat menumbuhkan potensi lokal suatu daerah dalam kegiatan ekonomi [6].
- b. Norma. Norma tidak dapat dipisahkan dalam hubungannya dengan jaringan sosial dan kepercayaan. Dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat, modal sosial melibatkan jaringan sosial, norma dan kepercayaan [29]. Norma berperan sebagai pembenteng komunitas, organisasi/ lembaga dan masyarakat terhadap pengaruh negatif yang merusak. Norma juga mengatur pola perilaku komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat. Norma berperan mengontrol perlindungan yang tumbuh dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat [31]. Norma sosial turut menjaga keberlangsungan komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat [13]. Norma sosial juga dijelaskan sebagai penangkal akan pengaruh negatif yang merusak tatanan komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat [12].
- c. Kepercayaan. Kepercayaan berpengaruh pada hubungan yang berkelanjutan dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat. Kepercayaan muncul akibat adanya *share value* sebagai dasar dalam menciptakan pengharapan dan kejujuran dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat [32] yang menghasilkan komitmen untuk mencapai tujuan bersama secara terus-menerus [24]. Kepercayaan merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, ketidakpastian dan

kemandirian. Kepercayaan didasarkan pada keberanian dalam mengambil risiko dan didasarkan pada keyakinan bahwa anggota komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat saling mendukung satu sama lain [33]. Kepercayaan berpotensi besar dalam mewujudkan komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat yang mandiri [32]. Kepercayaan juga berpengaruh pada aktivitas ekonomi. Kepercayaan meningkatkan kegiatan ekonomi.

Aspek Modal Sosial

Modal sosial digunakan sebagai alat uji hubungan dan komunikasi antar anggota komunitas,

organisasi/lembaga dan masyarakat. Modal sosial dibagi dalam tiga aspek [34], antara lain: (a) Aspek struktural: Hubungan antar anggota komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat. Aspek ini dikaitkan dengan pola komunikasi dan hubungan antara pihak-pihak dalam kehidupan sosial [35]; (b) Aspek kognitif: Kesamaan prinsip dan tujuan yang hendak dicapai. Aspek ini dikaitkan dengan kesamaan budaya, tujuan dan visi bersama oleh berbagai pihak dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat [36]; (c) Aspek relasional: Adanya sikap kekeluargaan yang terus-menerus dijalani dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat. Dimensi ini mengacu pada kepercayaan, persahabatan, rasa hormat dan interaksi yang dibangun secara berkelanjutan oleh berbagai pihak dalam kehidupan sosial [37].

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang keseluruhan atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU No. 32 tahun 2004). BUMDes menggerakkan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desa bersama-sama. BUMDes adalah organisasi di desa yang bertujuan memberdayakan dan mengembangkan kemandirian masyarakat desa dengan melibatkan pengelolaan penuh masyarakat pedesaan dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa [38][23]. BUMDes merupakan organisasi/lembaga di desa yang berdiri atas gagasan pemberdayaan ekonomi masyarakat [3]. BUMDes menawarkan kerjasama untuk mengolah potensi desa menjadi bermanfaat bagi desa. Adanya kerjasama dan simbiosis yang baik antara pengelola BUMDes dan Pemerintah Desa serta berbagai elemen desa untuk saling mendukung dan mempromosikan desa [4]. Jadi, BUMDes menjalankan kegiatannya melalui kekayaan desa dengan dikembangkan secara penuh oleh masyarakat desa dan

berdasarkan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendes No. 4 tahun 2015, susunan kepengurusan pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa dengan tujuan tidak adanya penyalagunaan jabatan ganda. Susunan kepengurusan yang dimaksud menyesuaikan dengan penyebutan nama setempat di desa yang dilandasi dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Susunan kepengurusan pengelola BUMDes menurut Permendes No. 4 tahun 2015 terdiri dari:

- a. Penasihat. Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh kepala desa yang bersangkutan yang berkewajiban memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
- b. Pelaksana Operasional. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berkewajiban melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa, mengali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan PAD, dan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- c. Pengawas. Pengawas adalah sekelompok orang yang bertugas mewakili kepentingan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan BUMDes. Pengawas berkewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Determinan Modal Sosial di BUMDes

Faktor determinan modal sosial di BUMDes berkaitan langsung dengan aktor-aktor yang mengetahui, memahami dan terlibat dalam kegiatan atau memiliki hubungan dengan BUMDes [6]. Aktor-aktor tersebut tentunya merujuk kepada pemegang kekuasaan dan legitimasi, pemilik kepentingan dan peran khusus dalam dinamika desa, menguasai pengetahuan serta sumber daya dan memiliki kepentingan pada pembangunan ekonomi di desa [4]. Aktor-aktor tersebut merupakan individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi/lembaga

khususnya di BUMDes. Pada tingkat individu, modal sosial tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-ekonomi, usia, tingkat modal manusia (pendidikan dan pekerjaan) dan pendapatan [18]. Usia seseorang dapat menjadi penentu dalam pengelolaan organisasi/lembaga khususnya di BUMDes. Sedangkan tingkat modal manusia dan pendapatan dapat memperkuat kepercayaan dan norma-norma di organisasi/lembaga khususnya di BUMDes. Faktor penentu lainnya adalah jenis kelamin. Dalam beberapa penelitian yang penulis ketahui menyebutkan bahwa jenis kelamin berpengaruh pada rendahnya tingkat jaringan terutama bagi perempuan, tingginya kontak sosial bagi laki-laki dan tingginya norma-norma yang dipegang bagi perempuan.

Pengaruh Modal Sosial terhadap Kinerja BUMDes

Modal sosial mempunyai pengaruh yang penting dalam meningkatkan kinerja BUMDes. Keinginan dari

aktor-aktor yang berhubungan dengan BUMDes menjadikan komponen modal sosial digunakan untuk memperkuat kelompok atau individu terhadap kinerja BUMDes [9]. Kinerja BUMDes bermula dari modal sosial yang terwujud atas rasa saling percaya dan kerja sama untuk mewujudkan kepentingan bersama dan menciptakan jejaring baru [29]. Modal sosial menumbuhkan sumber daya baru dan mendorong setiap pengurus BUMDes untuk dapat bekerja lebih lagi dalam memajukan kelembagaan BUMDes yang merupakan salah satu dari kinerja BUMDes [3]. Pengurus BUMDes yang memiliki modal sosial akan berkomitmen dalam memajukan desa melalui BUMDes [13]. Modal sosial juga membentuk kolaborasi sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk pembangunan BUMDes lewat kerja sama pengurus BUMDes dengan masyarakat [23]. Bukan hanya itu saja, modal sosial juga menjadi alat dalam mendukung dan mempromosikan desa melalui kerja sama dan simbiosis yang baik antara pengurus BUMDes dan pemerintahan desa [4].

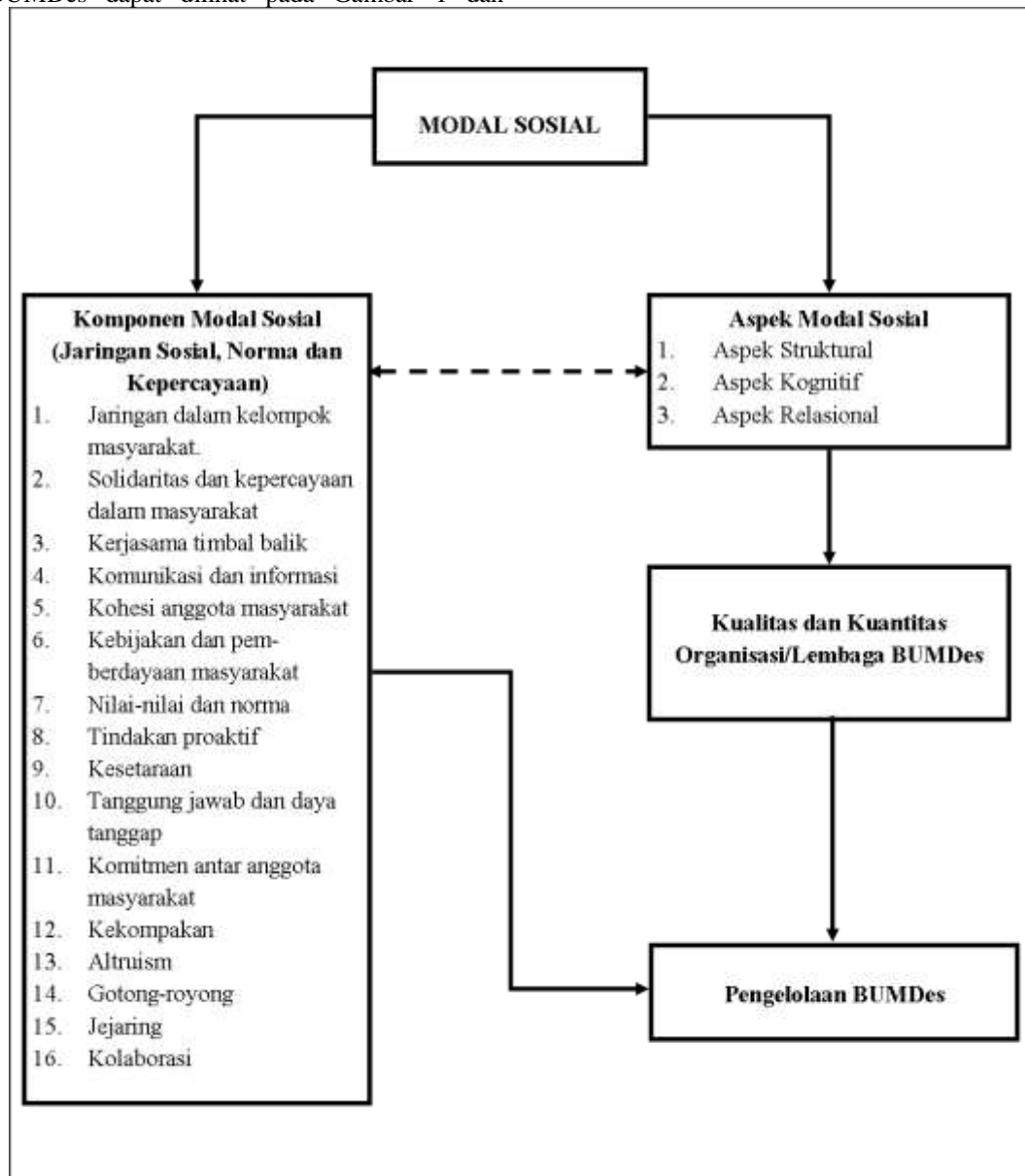
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode review literatur untuk mengetahui hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes. Metode penelitian ini terdiri pada beberapa tahap. Pertama, menentukan topik terkait dengan hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes. Kedua, menentukan sumber pustaka yang relevan terkait dengan topik. Ketiga, melakukan analisis sumber pustaka untuk mengidentifikasi hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes. Keempat, membuat model konseptual hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejumlah literatur tentang modal sosial dan kinerja BUMDes menjadi sumber kajian penting dalam membuat model konseptual hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes. Berdasarkan kajian literatur dan analisis

penulis, model konseptual hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Model Deskriptif Modal Sosial (Diolah)

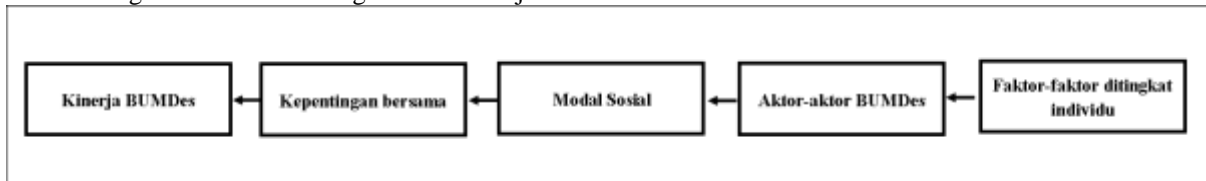
Pada Gambar 1 terlihat bahwa kajian modal sosial dalam pengelolaan BUMDes diwujudkan dalam komponen-komponen modal sosial di desa. Komponen utama dalam modal sosial terdiri dari jaringan, norma dan kepercayaan sosial. Melalui ketiga komponen utama ini, modal sosial dapat diimplementasikan ke dalam komponen yang lebih luas. Komponen yang lebih luas ini tentunya menyesuaikan kondisi lingkungan, budaya dan sosial-ekonomi suatu desa. Komponen modal sosial ini menjadi perekat sosial dalam menjaga keharmonisan bersama-sama. Adanya komponen yang lebih luas ini kualitas dan kuantitas organisasi/lembaga BUMDes dapat semakin baik, sehingga pengelolaan BUMDes juga semakin baik. Dalam menjaga keharmonisan bersama diperlukan alat uji hubungan dan komunikasi antar

anggota organisasi/lembaga BUMDes. Alat uji ini berupa aspek-aspek modal sosial. Aspek-aspek modal sosial ini berhubungan dengan kualitas dan kuantitas dari organisasi/lembaga BUMDes, sehingga berpengaruh juga pada pengelolaan BUMDes.

Gambaran hubungan sebab-akibat antara modal sosial dan kinerja BUMDes dapat dilihat pada Gambar 2. Hal ini dipicu oleh adanya faktor-faktor ditingkat individu berupa sosial-ekonomi, usia, tingkat modal manusia (pendidikan dan pekerjaan), pendapatan dan jenis kelamin. Faktor-faktor ditingkat individu ini kemudian menunjuk pada aktor-aktor yang memegang kekuasaan dan memiliki kepentingan pada pembangunan ekonomi di desa terutama kaitannya dengan BUMDes. Aktor-aktor tersebut kemudian menjadikan elemen modal sosial untuk

memperkuat kekuasaan dan kepentingan. Aktor-aktor tersebut menggunkan rasa saling percaya dan kerja sama sebagai bagian dari komponen modal sosial. Hal ini dibutuhkan karena perlunya membentuk kolaborasi sosial dan pemberdayaan ekonomi di desa. Aktor-aktor tersebut juga mendorong keberhasilan strategi untuk mewujudkan

kepentingan bersama di BUMDes. Kepentingan bersama dalam memajukan desa sebagai salah satu dari upaya untuk mempengaruhi kinerja BUMDes di desa.



Gambar 2. Model Kausalitas Modal Sosial dan Kinerja BUMDes (Diolah)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes. Modal sosial yang terlihat dalam komponen utama modal sosial yang terdiri jaringan, norma dan kepercayaan sosial dan komponen yang lebih luas yang menyesuaikan kondisi lingkungan, budaya dan sosial-ekonomi suatu desa. Adanya komponen modal sosial ini, tentunya berpengaruh pada pengelolaan BUMDes. Dalam pengelolaan BUMDes dipengaruhi oleh faktor-faktor pada tingkat individu berupa sosial-ekonomi, usia, tingkat modal manusia (pendidikan dan pekerjaan), pendapatan dan jenis kelamin. Faktor-faktor inilah yang memunculkan aktor-aktor yang ada dalam BUMDes yang kemudian menjadikan elemen modal sosial untuk memperkuat kekuasaan dan kepentingan. Adanya aktor-aktor BUMDes inipula keberhasilan strategi dalam mewujudkan kepentingan bersama di BUMDes tercapai. Hal itu merupakan kinerja BUMDes dalam mengembangkan potensi desa melalui pengelolaan BUMDes yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. J. Esman dan N. T. Uphoff, "Local Organizations: Intermediaries in Rural Development." Cornell University Press, Ithaca, New York., 1986.
- [2] D. Kirowati dan L. D. Setia, "Pengembangan Desa Mandiri melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa tembora Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)," *J. AKSI (Akuntansi dan Sist. Informasi)*, vol. 2, no. 1, hal. 15–24, Mei 2018.
- [3] H. Ubaidillah, "Analisa pengaruh Modal Sosial terhadap Organizational Citizenship Behaviors (OCB) dengan Mediasi Kepercayaan pada Manajemen BUMDesa.," *J. Ilm. Sains dan Ilmu Pendidik.*, vol. 68, no. 1, hal. 53–61, 2017.
- [4] M. R. R. S. Anggraeni, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunug Kidul Yogyakarta.," *J. Modus*, vol. 28, no. 2, hal. 155–167, Des 2016.
- [5] S. Palupi, U. Ulfiah, Prasetyohadi, Y. S. Sukapti, dan S. Al Fauzi, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-undang Desa Berbasis Hak.*, 1 ed., vol. 7, no. 3. Jakarta: Lakpesdam PBN, 2016.
- [6] B. S. Putra, "BUMDes Al-Madina dalam Perspektif Modal Sosial James S. Coleman (Penelitian Tentang Pengembangan Perekonomian Desa)," *J. Sociol.*, hal. 1–15, 2018.
- [7] Hastowiyono dan Suharyanto, *Seri Buku Pintar BUM Desa Penyusunan Kelayakan Usaha dan Perencanaan Usaha BUM Desa*, 1 ed. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pemabahaaran Desa, 2014.
- [8] P. Collier, "SOCIAL CAPITAL AND POVERTY," 1998.
- [9] S. K. Santi, "Peran Modal Sosial dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pongok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten," *J. Univ. Negeri Yogyakarta*, vol. 7, no. 2, hal. 145–157, 2018.
- [10] J. Hasbullah, *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press, 2006.
- [11] J. Ife dan F. Tesoriero, "Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2008.
- [12] J. S. Coleman, *Dasar-dasar Teori Sosial (Edisi Revisian)*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- [13] N. P. Mirayani, "Peranan Modal Sosial dalam Pengelolaan Perusahaan Air Minum Desa (PAMdes) Tri Mandala Tirta (Studi Kasus: Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar).," *J. Citiz.*, vol. 1, no. 1, 2014.
- [14] Syahyuti, "The Role of Social Capital in Agricultural Trade.," *Forum Penelit. Agro Ekon.*, vol. 26, no. 1, hal. 32–43, 2008.
- [15] Andreas & Savitri. E., "Role of Economic Empowerment of Coastal Communities and Social Capital in Improving Prosperity in Meranti and Rokan Hilir District. University of Riau. Pekanbaru," 2016.

- [16] R. S. Burt, "Structural Holes: The Social Structure of Competition," vol. 21, no. 4. Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, hal. 122–143, 1992.
- [17] F. Fukuyama, "Social; Civil Society and Development," *Third World Q.*, vol. 22, no. 1, hal. 7–20, 2001.
- [18] J. P. Gibbs dan J. S. Coleman, "Foundations of Social Theory.," *Soc. Forces*, 1990.
- [19] R. D. Putnam, "Bowling Alone: America's Declining Social Capital," *J. Democr.*, vol. 6, no. 1, hal. 65–78, 1995.
- [20] R. M. Solow, *Economic progress and the idea of social capital*. Washington DC: The World Bank, 1999.
- [21] G. F. Kebede, "Social Capital and Entrepreneurial Outcomes: Evidence from Informal Sector Entrepreneurs in Ethiopia," *J. Entrep.*, vol. 27, no. 2, hal. 209–242, Sep 2018.
- [22] A. E. Yustika, *Ekonomi Kelembagaan, Definisi, Teori dan Strategi*. Malang: Banyumedia Publishing, 2008.
- [23] D. Mamanini, "Pola Pengembangan Usaha BUMDes untuk Mewujudkan Peningkatan Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau.," *J. Akunt. dan Manaj.*, vol. 13, no. 1, hal. 496–505, 2016.
- [24] Q. Cao, Z. Simsek, dan J. J. P. Jansen, "CEO Social Capital and Entrepreneurial Orientation of the Firm: Bonding and Bridging Effects," *J. Manage.*, 2015.
- [25] E. Suharto, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial." Refika Aditama, Bandung, 2005.
- [26] L. Satlita, U. Dewi, dan A. Priyanto, "Strengthening Social Capital in Implementing Segoro Amarto Movement to Alleviate poverty in Yogyakarta City," *Int. J. Soc. Stud.*, vol. 13, hal. 70–81, 2017.
- [27] K. P. Adhikari dan P. Goldey, "Social Capital and its 'Downside': The Impact on Sustainability of Induced Community-Based Organizations in Nepal." *World Dev.*, vol. 38, no. 2, hal. 184–194, Feb 2010.
- [28] V. Aliabadi, P. Ataiee, dan R. Movahedi, "The Effect of Strategic Thinking and Social Capital on Recognition of Entrepreneurial Opportunities among Rural Youths (Case Study: Kangavar County)," *J. Res. Rural Plan.*, vol. 5, hal. 95–110, 2016.
- [29] R. D. Putnam, "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life dalam The American Prospect," vol. 13, hal. 335–42, 1993.
- [30] M. Granovetter, "The Strength of Weak Ties." University of Chicago Press, Chicago, 2001.
- [31] M. J. Mawardi, "Peranan Social Capital dalam Pemberdayaan Masyarakat," *J. Pengemb. Masy. Islam*, vol. 3, no. 2, hal. 5–14, 2007.
- [32] F. Fukuyama, "Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity." Free Press, New York, 1995.
- [33] A. Fox, "Exchange and Trust Dynamics," in *Beyond Contract: Work Power and Trust Relations*, London, 1974.
- [34] J. Nahapiet dan S. Ghoshal, "Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage," *Acad. Manag. Rev.*, vol. 23, no. 2, hal. 242, Apr 1998.
- [35] R. S. Burt, *The network structure of social capital*, vol. 22. 2000.
- [36] O. Ozigi, "Social Capital and Financial Performance of Small and Medium Scale Enterprises," *J. Adv. Res. Bus. Manag. Stud.*, vol. 1, no. 10, hal. 18–27, 2018.
- [37] C. J. Gelderman, J. Semeijn, dan P. P. Mertschuweit, "The impact of social capital and technological uncertainty on strategic performance: The supplier perspective.," *J. Purch. Supply Manag.*, vol. 22, no. 3, hal. 225–234, 2016.
- [38] I. N. Suastika, "Village Enterprises (a Case Study of Rural Enterprise-Based Social Capital At the Purwakerti Village Community)," *South East Asia J. Contemp. Business, Econ. Law*, vol. 12, no. 4, hal. 26–29, 2017.